

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 7



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah Berita : BPK Pusat

Aparat Pemda Jangat Takut Terhadap Petugas BPK

<http://www.galamedianews.com/nasional/160504/aparat-pemda-jangat-takut-terhadap-petugas-bpk.html>

Wartawan: Tok Suwarto

BADAN Pemeriksa Keuangan (BPK) minta aparat pemerintah daerah (Pemda) tidak takut saat ada petugas BPK datang menjalankan tugas pemeriksaan keuangan. Hal itu bertujuan agar Pemda selalu berkomitmen mempertanggungjawabkan keuangan daerah secara akuntabel dan transparan dan BPK berkomitmen akan terus mengawal terwujudnya cita-cita sistem keuangan tersebut.

"Akuntabilitas keuangan itu bertujuan untuk mengetahui efektifitas kinerja pemerintah daerah dalam mengelola sistem keuangan dan menata keuangannya," kata anggota BPK, Ismayatun, dalam dialog terbuka "Upaya Mempertahankan Kualitas Laporan Keuangan dalam Rangka Transparansi dan Akuntabilitas Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Daerah" di rumah dinas Wali Kota Solo, Loji Gandrung, Jumat (8/9/2017).

Di depan peserta dialog yang berasal dari Pemda se wilayah Surakarta, Ismayatun mengungkapkan, komitmen pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan laporan keuangan daerah secara transparan harus terus diperbaiki. Menurut dia, banyak daerah yang merasa puas setelah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK.

"Ada daerah yang menganggap opini BPK itu sebagai prestasi. Tetapi ada juga yang menganggap WTP hanya penilaian biasa dan ada yang menganggap WTP hanya sebatas penghargaan yang bisa dibeli," katanya.

Menanggapi pandangan beragam berbagai daerah dalam pengelolaan keuangan itu, dia berharap seluruh daerah dapat mempertanggungjawabkan keuangan secara transparan dengan terus menerus melakukan perbaikan. Dia tidak ingin ada daerah yang setelah mendapatkan WTP tetap dalam kondisi seperti biasa, lantaran ada anggapan WTP tidak berpengaruh. Selain itu ada daerah yang menjadikan WTP sebagai perisai yang mengesankan dalam sistem pengelolaan keuangan di daerah tidak terjadi praktik korupsi.

"Ada juga daerah yang setelah mendapat opini WTP tujuh kali, mengadakan syukuran di pinggir kali," tutur anggota BPK itu.

Menyinggung perkembangan pengelolaan sistem keuangan, BPK menilai ada tren opini positif dalam laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) di Indonesia. Berdasarkan catatan BPK, pada tahun 2014 terdapat 21 kabupaten yang mendapatkan opini WTP. Dalam dua tahun berikutnya, pada 2016 jumlah kabupaten dan kota yang mendapat opini WTP meningkat menjadi 31 kabupaten dan kota.